

ABSTRACT

In an economic policy set, it has been formulated about *UKM* (little and mediate business) improvement involving *UKM* debt restructurization and refinancing. The refinancing is given to proper *UKM*, therefore, it is needed certain party that acts as risk guarantor for that refinancing. Micro business sector is also potential business sector in Indonesia that achieves 80 percent of 42 million *UMKM* (micro, little and mediate business) number in Indonesia. Loan in micro credit form is also an effective way in resolving poverty. However, loan delivery to such group is not separated from some obstacles, those are: insufficient security, business reasonability, and little entrepreneur resources that have weakness in management and market access. The research is conducted to know: 1) How is public access to credit facility at People's Bank of Indonesian? And 2) Will the policy of Unit People's Bank of Indonesia related to the credit facility delivery to Little and Micro Business weaken or even strengthen the program of local development even distribution?

The research type is by using descriptive method in order to result of the research can give description or systematically, factually and accurately describes the object observed. Data collection is performed by doing interview to obtain primary data, whereas the secondary data is obtained by using documentation technique.

The research shows that credit facility from People's Bank of Indonesia to the Micro Business and Little Business groups make people, who receive credit facility, escape from structural poverty, where the people will obtain access to capital resource to perform a business. Factors influencing credit delivery is done based on high selectivity principles and still based on prudential banking principles. By such policy strategies, the People's Bank of Indonesia is maintained with average NPL value of 1.57 percent during 2003-2005. It shows that the People's Bank of Indonesia has achieved established target of 5 percent.

INTISARI

Di dalam paket kebijakan ekonomi, telah dirumuskan tentang peningkatan UKM yang di dalamnya menyangkut restrukturisasi utang UKM yang disertai dengan pembiayaan kembali (*refinancing*). Pembiayaan kembali hanya diberikan kepada UKM yang layak, karena itu perlu ada pihak tertentu yang bertindak sebagai penjamin risiko bagi *refinancing* itu. Sektor usaha mikro juga merupakan sektor usaha yang potensial di Indonesia. yakni mencapai 80 persen dari 42 juta jumlah UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) yang ada di Indonesia. Pinjaman dalam bentuk *micro credit* juga merupakan salah satu cara yang ampuh dalam menangani kemiskinan. Namun pemberian kredit kepada kelompok tersebut tidak terlepas dari beberapa kendala, diantaranya: agunan yang kurang memadai, kelayakan usaha, sumber daya pengusaha kecil yang memiliki kelemahan dalam pengelolaan (manajemen) dan akses pasar. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui : 1) Bagaimana akses publik terhadap fasilitas kredit di Bank Rakyat Indonesia? dan 2). Apakah kebijakan BRI Unit berkaitan dengan pemberian fasilitas kredit terhadap Usaha Kecil dan Mikro akan melemahkan atau justru menguatkan program pemerataan pembangunan daerah?

Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif agar hasil penelitian dapat memberikan gambaran atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat tentang objek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data primer, sedangkan data sekunder didapatkan dengan menggunakan teknik dokumentasi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa fasilitas kredit dari Bank Rakyat Indonesia kepada kelompok Usaha Mikro dan Usaha Kecil mengakibatkan masyarakat yang mendapatkan fasilitas kredit dapat terbebas dari jenis kemiskinan struktural, dimana masyarakat akan mendapatkan akses terhadap sumberdaya modal untuk berusaha. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian kredit dilakukan atas dasar asas selektivitas yang tinggi dengan tetap berpegang pada *prudential banking principles*. Dengan adanya strategi kebijakan tersebut, Bank Rakyat Indonesia terpelihara dengan nilai rata-rata NPL pada tahun 2003-2005 hanya sebesar 1,57 persen. Ini menunjukkan bahwa Bank Rakyat Indonesia telah mencapai target yang ditetapkan sebesar 5 persen